

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007)

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003)

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Badan Pertanahan Nasional, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta; Biro Hukum dan Humas BPN, 2005)

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I- Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan Permasalahannya. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)

Dewi Zulkharnain, Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II, (Surabaya: Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum, 2013)

Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan
Tanah,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012),

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Gary Goodpaster, Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri
Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1995)

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR),(Jakarta:
Indonesia Business Law Center (IBLC), 2007)

Herwandi, Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara,(Semarang:
Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010)

I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai
Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali,
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan,
(Jakarta: Visimedia, 2011)

Laurence Boulle, Mediation Principles, Procces and Practice, (New York:
Prince Hall, 1996)

Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah,
(Jakarta: Mandar Maju, 2008)

Salman Maggalatung dan Amrizal Siagian, Pengantar Studi Antropologi
Hukum Indonesia. (Jakarta: UIN Press, 2015)

Nae, Fandri Entiman, Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas
Tanahyang Sudah Bersertipikat. (Jurnal Lex Privatum, 2013) Vol.
I/No.5.

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
di Indonesia,(Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatra
Utara, 1 April

2006 Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah,
(Bandung: Mandar Maju, 1991)

Sembiring, Jimmy Joses, Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan,
(Jakarta. Visimedia. 2011)

Sunario Basuki, Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi
Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah,
Program PendidikanSpesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental
Disputes Resolution), (Surabaya: Press University Airlangga

University Press, 2003)

Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research, Cet. Ke-I (Yogyakarta:

Yayasan PenerbitFakultas Psikologi UGM 1997)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 Tentang Mediasi.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang BadanPertanahan Nasional.

Perturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN dan Propinsidan Uraian Tugas Sub Bagian Seksi dan Urusan serta Sub Seksi Pada KantorPertanahan Kabupaten / Kota Madya.

Undang – Undang Pokok Agraria atau Undang Undang No. 5 Tahun 1960TentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Sumber Lain

Nia Kurniati, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*,
Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016: 207-217

Rayi Ady Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar
 Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”,
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Supranowo, *Sertifikat dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional,
 “Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya”, Yogyakarta, 9 Juli 1992.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*.

Angga. B. Ch. Eman, *Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan
 Pertanahan Nasional*, *Lex et Societatis* Vol. I/No. 5/ September/2013,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, hlm. 10, diakses pada 12 Mei 2023.

<http://repository.unpas.ac.id/28632/4/G.%20BAB%20II.pdf>, hlm 34, diakses pada
 12 Mei 2023.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/324/6/10220104%20Bab%202.pdf>, diakses pada
 12 Mei 2023.